PSI Dukung Penuh ITB Bekukan Organisasi Kemahasiswaan Berafiliasi ke HTI

written by Harakatuna

Harakatuna.com. Jakarta-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah Institut Teknologi Bandung (ITB) yang membekukan organisasi kemahasiswaan yang diduga terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Sikap kami di PSI jelas, mendukung pembekuan atau pembubaran organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan HTI. Lembaga pendidikan tinggi dan organisasi kemahasiswaan seharusnya ikut memperkuat ideologi Pancasila sebagai fondasi negara ini, bukan sebaliknya,” ujar Wasekjen dan Juru Bicara PSI, Danik Eka Rahmanningtyas di Jakarta, Selasa (9/07/2019).

ITB membekukan Harmoni Amal dan Titian Ilmu (HATI), organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi ke HTI. Langkah itu merupakan upaya terakhir pihak kampus setelah organisasi kemahasiswaan tersebut tidak mengindahkan peringatan dan teguran agar tidak mengundang tokoh-tokoh HTI dalam kegiatan diskusinya.

“Saya memahami bahwa di kampus ada kebebasan akademik. Tapi jangan sampai kebebasan akademik itu malah ditunggangi gerakan yang merongrong Pancasila dengan ideologi khilafah, salah satunya seperti HTI,” tandas dia.

Danik pun berharap kepada pihak rektorat dari kampus-kampus lain di Indonesia, untuk berani menindak organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan organisasi terlarang.

“Semoga kebijakan ITB ini bisa menjadi inspirasi dan dicontoh kampus-kampus lain di Indonesia,” ujar Danik.

Danik mengingatkan, pada akhir Mei lalu, Setara Institute memaparkan bahwa 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terpapar radikalisme. Di sana ada gerakan dan wacana kelompok Islam eksklusif.

“Harus ada upaya serius dan sistematis untuk merespons temuan Setara Institute

tersebut. Jika ada organisasi kemahasiswaan yang terafiliasi dengan HTI atau organisasi terlarang lain, tindakan tegas harus ditempuh,” pungkas Danik.

Pemerintah RI telah membubarkan HTI melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tidak berselang lama, DPR mengesahkan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pengganti Perppu tersebut.